

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

a) Tujuan

Meningkatkan kualitas, status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

b) Sasaran

Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan memberi pelatihan, ketrampilan dan motivasi kepada Perempuan Kepala Keluarga, Perempuan Pekerja Rumahan dan Kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.300.000.000,00 dengan realisasi Rp. 5.284.848.407,00 (99.71%) yang secara rinci realisasi per kegiatan dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan motivasi perempuan pekerja rumahan dengan peserta perempuan kepala keluarga sebanyak 60 orang yang berasal dari Kota Malang, Kab. Malang dan Kota Batu selama 20 hari.
- Pemberdayaan Perempuan dalam rangka memanfaatkan Limbah disekitar lingkungan menjadi kompor gas dengan peserta 40 orang.
- Meningkatnya pengetahuan Kader Posyandu dan Tim Penggerak PKK Kab/Kota untuk dapat mengisi Kartu Menuju Sehat (KMS) model terbaru sebanyak 60 orang.

- Terlaksananya pendataan jumlah Buta Aksara Perempuan di 8 Kab/Kota di Jatim.
- Terlaksananya Sosialisasi dan Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI) antar Kab/Kota yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang GSI dengan pemenang 4 (empat) Kab/Kota yaitu Pemenang I : Kabupaten Malang, II : Kabupaten Ngawi, III : Kota Madiun, Juara Harapan : Kabupaten Gresik.
- Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Bersama 3 Menteri tentang pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja dengan peserta 65 orang.
- Terlaksananya Rakor tentang pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu di Kab/Kota se Jawa Timur sebanyak 76 orang *dalam rangka meningkatkan pelayanan korban di Pusat Pelayanan Terpadu.*
- Terpahaminya perundang-undangan tentang Pornografi, Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta UU tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 114 orang.
- Terlaksananya Rencana Aksi Provinsi (RAP) gugus tugas perlindungan perempuan dan anak di 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 76 orang *dalam rangka mencegah terjadinya KDRT dan trafiking.*
- Terlaksananya kongres anak dan terlaksananya Fasilitasi Kota Ramah Anak dengan peserta 90 anak dari Kab/Kota se Jawa Timur.
- Terlaksananya pelatihan dan peningkatan ketrampilan Kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) sebanyak 100 orang *agar lebih mandiri.*

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan dari Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan adalah Rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Politik.

Upaya pemecahan masalah dari Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan adalah :

- Pemberdayaan ekonomi perempuan dengan memberi pelatihan, ketrampilan dan motivasi kepada perempuan kepala keluarga, perempuan pekerja rumahan dan kelompok pemberdayaan perempuan pengembang ekonomi local.
- Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan, serta bidang Pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
- Meningkatkan peran perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan.
- Peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan public.

2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

a) Tujuan

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program kegiatan jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan Kab/Kota se Jawa Timur melalui perencanaan, penganggaran responsive gender atas kebijakan pembangunan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Jawa Timur.

b) Sasaran

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan Gender melalui Organisasi perempuan dan masyarakat, Perguruan Tinggi, Badan/Dinas/Biro terkait dan anggota Pokja PUG.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.650.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.641.991.350,00 (99.51%) yang secara rinci per kegiatannya dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

- Sejumlah 31 (Tiga Puluh Satu) SKPD di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur telah menyusun Anggaran Responsif Gender.
- Mendorong Kabupaten/Kota se Jawa Timur untuk percepatan pelaksanaan PUG dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di masing-masing wilayah. Pada tahun 2011, sebanyak 11 Kab/Kota di Jawa Timur yang telah melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan 3 Kab/Kota masuk nominasi untuk dilakukan pemantauan dan penilaian yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang.
- Meningkatnya koordinasi dan sinergitas program kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Kab/Kota se Jawa Timur dengan mekanisme dan penyusunan formulasi Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
- Tersedianya data terpilah dan data perspektif gender, profil gender, dan bulletin parahita liflet PUG dan PUA pada tiap Triwulan.
- Tersedianya buku Indeks Pembangunan Manusia yang berbasis Gender Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.
- Terumuskannya PUG dan PUA dalam setiap unsur perencanaan, pelaksanaan anggaran serta kebijakan public yang respon gender dengan peserta 300 orang.

- Terlaksananya workshop jejaring kelembagaan PUG dan PUA dengan peserta 60 orang dari lembaga masyarakat, BPPKB Kab/Kota dan SKPD Provinsi Jatim.
- Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dengan peserta 50 orang *dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak anak di Kab/kota se Jawa Timur..*
- Terlaksananya Inisiasi pengembangan Kab/Kota Layak Anak (KLA) pada 38 Kab/Kota.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan dari Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan adalah :

- Kurangnya pemahaman anggota Pokja PUG (Anggota focal Point Gender SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) tentang penyusunan Anggaran Responsif Gender.
- Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan di Kab/Kota se Jawa Timur dalam pengambilan kebijakan bidang PUG.
- Terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan untuk menganalisa isu dan permasalahan gender di masing-masing wilayah.
- Kurangnya koordinasi dan sinergitas program kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Kab/Kota di Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Timur dalam perencanaan penganggaran yang responsive gender.
- Upaya pemecahan masalah dari Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan adalah :
- Telah dilaksanakan workshop pemantapan penyusunan Anggaran Responsif Gender bagi anggota Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)/anggota focal point Gender SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- Telah dilaksanakan advokasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kab/Kota se Jawa Timur.
- Dilaksanakannya kegiatan fasilitasi peningkatan kemampuan sumberdaya manusia untuk menganalisa isu dan permasalahan gender bagi anggota Pokja PUG (anggota focal point Gender SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur).
- Telah dilaksanakan advokasi pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Kab/Kota se Jawa Timur dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan PUG.

f) Penghargaan

Untuk penghargaan tingkat Nasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 telah mendapatkan penghargaan bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Presiden RI yaitu PURNA ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) TINGKAT UTAMA TINGKAT PROVINSI (ke-5 Kali) dan Tahun 2011 mendapatkan penghargaan serupa untuk yang ke enam kalinya. Untuk Kabupaten/Kota pada tahun 2010 yang mendapatkan penghargaan bidang Pengarusutamaan Gender dari Presiden RI berupa PARAHITA EKAPRAYA (APE) TINGKAT KAB/KOTA kategori tingkat Utama yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, dan Kota Surabaya.

3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

a) Tujuan

- Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistik gender serta peningkatan partisipasi masyarakat.

- Mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam menikmati hasil-hasil pembangunan di semua sektor
- Meningkatkan peranan perempuan dalam upaya menciptakan lingkungan desa/kelurahan sehat dan sejahtera melalui berbagai bidang pembangunan : kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum dan HAM, pertanian dll.

b) Sasaran

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak ini dengan total anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dengan realisasi Rp. 396.246.025 (99.06%) yang secara rinci per kegiatannya dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 kolom)

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Terlaksananya lomba P2WKSS dengan peserta dari 38 Kab/Kota di Jawa Timur dan terpilih 4 nominator terbaik Desa/Kelurahan Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
(P2WKSS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Terbaik I : Desa Tejo , Kecamatan Kanor. Kabupaten Bojonegoro, terbaik II : Desa Minggisari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Pelaksana Terbaik III : Desa Biting Kecamatan Bedegan Kabupaten Ponorogo, Terbaik IV : Desa Banjardowo Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
- Terlaksananya capacity building tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi 63 pejabat SKPD Prov. Jatim *diharapkan pejabat SKPD memahami dan mengetahui tentang kesetaraan dan keadilan gender.*

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan dari Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender adalah Banyaknya peraturan perundang-undangan yang bias gender

Upaya Pemecahan masalah dari Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender adalah :

- Pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi 63 SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur.